

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kota Bandung merupakan Ibukota Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Secara geografi, Kota Bandung terletak diantara 107° Bujur Timur dan 6° 55' Lintang Selatan. Berdirinya Kota Bandung tidak beriringan dengan berdirinya Kabupaten Bandung. Pembangunan keduanya memiliki tenggat waktu yang sangat lama dengan Kabupaten Bandung lebih dini. Surat keputusan yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 1810 merupakan mandat peresmian Kota Bandung sebagai ibukota baru (Pemerintah Provinsi Jawa Barat, 2017).

Badan Pusat Statistik Kota Bandung menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Kota Bandung sebanyak 2.452.179 jiwa. Jumlah penduduk tersebut membuat Kota Bandung memiliki permasalahan yang lebih kompleks dibandingkan dengan wilayah lain. Untuk itu, diperlukan organisasi yang cukup untuk memenuhi segala harapan masyarakat atas kinerja perangkat daerahnya. Berdasarkan data dari website resmi Pemerintah Kota Bandung, Wilayah pemerintahan Kota Bandung terdiri dari 53 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), diharapkan dalam proses pelayanannya bisa lebih transparan kepada publik.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengatakan bahwa opini pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperlihatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah terkait dalam pengelolaan keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan empat jenis opini terhadap laporan keuangan pemerintah, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Memberikan Pendapat (TMT), dan Tidak Wajar (TW). Indikator yang menjadi dasar dalam penentuan opini untuk laporan keuangan yaitu penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian internal (BPK RI, 2020). Status WTP menggambarkan bahwa

laporan keuangan di entitas yang diperiksa itu telah menyajikan laporan keuangan secara wajar dalam hal yang material, hasil usaha, posisi keuangan dan arus kas entitas serta sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia (BPK RI, 2020). Berikut merupakan daftar opini LKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020.

Tabel 1.1

**Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2017-2020**

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020
Kota Bandung	WDP	WTP	WTP	WTP
Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bekasi	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Bogor	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cimahi	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Cirebon	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Depok	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Sukabumi	WTP	WTP	WTP	WTP
Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber: Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2020 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI, 2020)

Kota Bandung merupakan satu-satunya kota di Jawa Barat yang mendapatkan opini WDP pada tahun 2017. Namun, pada tahun 2018-2020 Kota Bandung mendapatkan opini WTP selama 3 tahun berturut-turut. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dikatakan bahwa salah satu indikator dalam penetapan opini adalah penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan Pemerintah Kota Bandung mengalami peningkatan dari 2017 ke 2018-2020. Dalam penyajiannya, sudah mengikuti prinsip akuntansi dengan baik selama tiga tahun berturut-turut. Hal ini yang menjadi dasar pemilihan Kota Bandung sebagai objek penelitian, karena terdapat perbaikan dalam penyajian laporan keuangan

1.2 Latar Belakang

Akuntansi Sektor Publik sangat berkaitan erat dengan penerapan akuntansi pada domain publik. Area sektor publik sangat luas dan kompleks dibandingkan dengan sektor bisnis. Lembaga pemerintah dan lembaga publik non pemerintah lainnya dituntut untuk memberikan pelayanan publik dan melengkapi kebutuhan publik. Kehadiran akuntansi sektor publik bertujuan untuk membentuk kondisi yang transparan, akuntabilitas, efektif, efisien, dan ekonomis. (Majid, 2019).

Minat masyarakat terhadap isu transparansi keuangan publik khususnya keuangan pemerintah di Indonesia semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Hal ini dikarenakan karena adanya desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini terjadi karena akibat dari otonomi daerah yang menyebabkan adanya perubahan dalam komposisi pengeluaran anggaran pada pemerintah pusat dan daerah (Widoretno, 2019). Faktor lain yang menjadi penyebab tingginya minat masyarakat terhadap isu transparansi adalah meningkatnya kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Menurut laporan dari *Transparency International* Indonesia, hasil *Corruption Perception Index* (CPI) tahun 2020 berada di skor 37/100 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dianalisis. Indeks CPI tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 3 poin dari tahun 2019 yang dimana berada pada skor 40/100. Sekretaris Jenderal *Transparency International* Indonesia, J Danang Widoyoko, menyebutkan bahwa turunnya skor CPI Indonesia tahun 2020 diakibatkan karena sejumlah kebijakan yang hanya berfokus pada ekonomi dan investasi tanpa memperhatikan faktor integritas dimana hal ini memicu praktik korupsi semakin mudah.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Disusul Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 188.52/1797/SJ/2012 tentang Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah (TPAD) merupakan kebijakan untuk memberi mandat kepada gubernur/bupati/wali kota agar lebih terbuka dalam memberikan informasi laporan keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 3 Dan Pasal 219 menjelaskan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab. Untuk

mencapai pengelolaan keuangan daerah yang telah disebutkan sebelumnya, kepala daerah diwajibkan untuk menyelenggarakan sistem pengendalian internal yang baik.

Transparansi laporan keuangan merupakan suatu keterbukaan kebijakan keuangan atau informasi keuangan yang mana dapat diketahui dan dimonitor oleh masyarakat dan lembaga legislatif. Adanya transparansi laporan keuangan akan melahirkan *horizontal accountability* antara pemerintah dengan masyarakat yang membuat pemerintahan daerah yang bersih, efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi dan hajat masyarakat (Majid, 2019). Pendapat lain mengatakan bahwa Transparansi merupakan salah satu karakteristik terciptanya *Good Governance* (Safrijal et al., 2016). Transparansi merupakan kemudahan penyampaian informasi keuangan secara terbuka dari pemerintah untuk para pemangku kepentingan dan masyarakat luas (Salle, 2017). Transparansi dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu adanya akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau semua kebijakan pemerintah dan adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan. Diterapkannya transparansi bertujuan untuk menciptakan rasa percaya antara publik dengan pemerintah, sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan meningkat dan berkurangnya pelanggaran terhadap undang-undang (Prokomsetda, 2017).

Terkait dengan transparansi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Komisi A, Erick Darmadjaya menyebutkan bahwa Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung belum transparan terkait aset-aset dan pengelolaan uang di Kota Bandung. BKAD dinilai belum mampu menyediakan ruang-ruang publikasi untuk pengelolaan aset dan keuangannya. Sedangkan, ruang publikasi tersebut sangat penting agar masyarakat bisa mengetahui informasi terkait aset maupun penggunaan alokasi dana Pemerintah Kota Bandung (Nurraniusmana, 2021). Fenomena tersebut sangat bertentangan dengan kewajiban pemerintah yaitu menghasilkan informasi keuangan dan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Salah satu syarat untuk mewujudkan transparansi adalah memberikan aksesibilitas laporan keuangan secara relevan, jujur, dan terbuka kepada publik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari penelitian terdahulu yaitu Tekanan Eksternal dan

Komitmen Manajemen (Utami, 2019), Penyajian Laporan Keuangan, dan Karakteristik Kualitatif (Yuliani, 2017), Pengendalian internal (Pasolo, 2019), Aksesibilitas (Apip & Maesaroh, 2016a), Environmental Uncertainty dan Accountability (Fathmaningrum & Mukti, 2019), Standard Operational Procedures dan Government Apparatus Competence (Ahmad et al., 2020), Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Penerapan SAP Berbasis Akrua (Ledo, 2018).

Pada penelitian ini, penulis memilih faktor Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen dikarenakan masih ditemukannya inkonsistensi dalam hal penyajian laporan keuangan, aksesibilitas dan komitmen manajemen pada pemerintah Kota Bandung. Selain itu, ketiga faktor tersebut dapat dijadikan tolak ukur sejauh mana pemerintah terkait merealisasikan transparansi dalam penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat khususnya di Kota Bandung.

Faktor pertama yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan. Penyajian Laporan Keuangan adalah bentuk tanggung jawab pemerintah atas pengelolaan keuangan daerah kepada publik dan dijadikan alat ukur untuk mengukur kinerja manajemen di pemerintah daerah (Aliyah & Nahar, 2012). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah mengatur bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan dengan menyampaikan laporan berupa laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah yang mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Bentuk pertanggungjawaban berupa laporan keuangan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyajian laporan keuangan pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan kualitas laporan keuangan sehingga laporan keuangan semakin kredibel dan dapat mewujudkan transparansi pelaporan keuangan pemerintah

daerah. Dengan kata lain, informasi keuangan yang disajikan dengan baik akan mendorong terciptanya transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Menurut penelitian Widoretno, (2019) dijelaskan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Yuliani, (2017) mengatakan bahwa penyajian laporan keuangan berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Aksesibilitas. Aksesibilitas merupakan kemudahan untuk pengguna laporan keuangan dalam mengakses laporan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diharuskan untuk memberikan kemudahan akses bagi lembaga legislatif, badan pengawas dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan mandat kepada pemerintah untuk mengelola aset publik (Fauziah & Handayani, 2017). DPRD Kota Bandung menilai Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bandung belum menyediakan ruang-ruang publikasi untuk pengelolaan aset dan keuangannya secara terbuka kepada masyarakat. Hal ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana dijelaskan bahwa pemerintah baik pusat atau daerah wajib untuk mempublikasikan informasi keuangan dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat menggunakan bahasa yang mudah dipahami.

Adanya unsur kemudahan, keterbukaan dan Accessible pada laporan keuangan pemerintah daerah merupakan faktor pendukung terpenuhinya prinsip transparansi laporan keuangan. Aksesibilitas laporan keuangan pemerintah yang semakin mudah akan menciptakan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Apip & Maesaroh (2016) yang membuktikan bahwa aksesibilitas berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, pada penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2017), dikatakan bahwa aksesibilitas berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Komitmen Manajemen. Definisi komitmen manajemen menurut Robbins dan Judge dalam

Nugroho (2018) merupakan suatu keadaan dimana seseorang memihak organisasi. Dalam hal ini komitmen manajemen bukan hanya tentang manajemen puncak, tapi seluruh pegawai yang terlibat langsung dalam organisasi tersebut. Pegawai yang memiliki sikap komitmen tinggi terhadap organisasinya membuat penerapan transparansi pelaporan keuangan semakin baik.

Bentuk komitmen tinggi pada pegawai SKPD seperti handal dan kompeten di bidangnya masing-masing yang berdampak kepada tercapainya transparansi laporan keuangan sehingga standar profesionalisme SKPD dapat terpenuhi. Bisa dikatakan bahwa komitmen manajemen yang tinggi akan memperluas transparansi pelaporan keuangan yang diterapkan (Pradita et al., 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh penelitian Fathmaningrum & Mukti (2019) yang membuktikan bahwa komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purba (2020) dimana dikatakan bahwa komitmen manajemen berpengaruh negatif terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang sudah disebutkan sebelumnya, memperlihatkan bahwa hasil yang cukup beragam mengenai Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Beragamnya hasil, membuat peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah karena hingga sekarang topik ini masih menarik untuk diteliti. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen. Dikarenakan masih adanya variabel yang sama dengan penelitian terdahulu, hal tersebut merupakan tujuan peneliti untuk menguji konsistensi hasil yang diperoleh dan melihatnya sesuai keadaan masa kini. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bandung Tahun 2021).**

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah merupakan sebuah indikator dalam menilai penyelenggaraan pelaporan keuangan daerah yang baik. Permasalahan yang sedang dihadapi beberapa daerah di Indonesia saat ini adalah masih ditemukannya laporan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang tidak transparan. Hal ini sangat bertentangan dengan kewajiban pemerintah yaitu menghasilkan informasi keuangan dan laporan keuangan yang transparan dan akurat. Anggota DPRD Kota Bandung menyebutkan bahwa masih kurangnya ruang-ruang publikasi untuk pengelolaan aset dan keuangan pemerintahan Kota Bandung. Hal ini sangat bertentangan dengan salah satu syarat untuk mewujudkan transparansi yaitu memberikan aksesibilitas laporan keuangan secara relevan, jujur, dan terbuka kepada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Bandung belum baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka pertanyaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Komitmen Manajemen dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung tahun 2021?
2. Bagaimana pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, dan Komitmen Manajemen secara simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung tahun 2021?
3. Bagaimana Pengaruh Penyajian Laporan keuangan secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung tahun 2021?
4. Bagaimana pengaruh Aksesibilitas secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung tahun 2021?
5. Bagaimana pengaruh Komitmen Manajemen secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bandung tahun 2021?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disampaikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Komitmen Manajemen dan Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.
2. Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Komitmen Manajemen secara simultan terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.
3. Untuk mengetahui pengaruh Penyajian Laporan Keuangan secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.
4. Untuk mengetahui pengaruh Aksesibilitas secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.
5. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Manajemen secara parsial terhadap Transparansi Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Bandung tahun 2021.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Berikut dikelompokkan menjadi dua aspek, yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk ilmu pengetahuan terkait akuntansi sektor publik, penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, komitmen manajemen, dan transparansi laporan keuangan pemerintah daerah.
2. Penelitian ini dapat menjadi informasi baik bagi penelitian selanjutnya.

1.5.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan tambahan informasi bagi pihak pemerintah terutama pemerintah Kota Bandung terkait faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi laporan keuangan. Adanya hasil penelitian ini

diharapkan pemerintah Kota Bandung dapat mengevaluasi kinerjanya agar laporan keuangan bisa lebih transparan untuk masyarakat.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan pada tugas akhir yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pertama peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum objek yang akan diteliti, latar belakang dalam melakukan penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan tugas akhir secara umum.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ke dua peneliti menjelaskan secara ringkas, padat, dan jelas mengenai landasan teori variabel-variabel yang telah dipilih yaitu Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Komitmen Manajemen, dan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dimana digunakan sebagai acuan dasar penelitian, penelitian terdahulu, pengembangan kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga ini peneliti memaparkan jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis, gambaran populasi serta sampel yang digunakan, dan melakukan identifikasi setiap variabel serta penjelasan indikator variabel terkait.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ke empat ini peneliti menjelaskan terkait sampel penelitian yang diambil, hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan juga pembahasan mengenai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil penelitian dan pembahasan diuraikan secara kronologis dan sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian.

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ke lima peneliti memberikan penjelasan kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilakukan penelitian dan saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN